

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi dalam laporan keuangan sangat penting bagi perusahaan dan *stakeholder*. Laporan keuangan dibuat oleh perusahaan pada periode tertentu untuk ditujukan pada pengguna laporan keuangan. Perusahaan membutuhkan laporan keuangan untuk mengetahui ulasan kondisi keuangan serta perubahan posisi keuangan perusahaan secara spesifik. Para *stakeholder* membutuhkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan karena laporan keuangan menggambarkan kinerja perusahaan. Maka dari itu, laporan keuangan harus bersifat relevan dan *reliable* agar dapat dipercaya kebenarannya.

Penyajian laporan keuangan perusahaan menjadi kewajiban pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan agar dapat dipertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya. Agar informasi keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan itu dapat diandalkan maka perlu jasa pihak ketiga. Jasa pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan yaitu jasa auditor akuntan publik. Dalam melaksanakan tugasnya, akuntan publik bertanggung jawab memberikan keyakinan untuk pengguna laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang dapat diandalkan dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Yulianti, N., Agustin, H. Taqwa, S. 2019). Dengan adanya audit laporan keuangan yang dilakukan akuntan publik, maka laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya serta tidak merugikan pemakai laporan keuangan (Sinaga & Rachmawati, 2018). Oleh karena itu, seorang auditor akuntan publik harus objektif dan profesional dalam melaksanakan pekerjaannya.

Akuntan publik dalam memberikan jasanya juga mendapatkan *fee* (komisi) yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Penggunaan jasa akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan menyebabkan munculnya biaya atas jasa audit laporan keuangan yang disebut *fee audit*. *Fee audit* tersebut ditentukan melalui proses negosiasi antara pihak *stakeholders* dengan Kantor Akuntan Publik yang menaungi auditor tersebut dengan memperhatikan berbagai faktor.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) telah menetapkan imbalan jasa audit yang pantas untuk jasa profesional yang diberikan oleh seorang auditor sesuai dengan peraturan tentang dasar penetapan imbalan jasa audit melalui Peraturan Pengurus IAPI No. 2 Tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit. Di Indonesia, besaran biaya audit yang perusahaan keluarkan untuk akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan perusahaan masih bersifat *voluntary disclosure*, yaitu tidak semua perusahaan mencantumkan *fee audit* pada laporan keuangannya. Meskipun demikian, besaran *fee audit* atau biaya audit dapat dilihat dari besarnya *Professional Fee* yang ada pada laporan keuangan. *Professional fee* merupakan suatu imbalan atas jasa yang diberikan kepada seorang profesi atas jasa yang dilakukannya.

Dalam hal penentuan Audit fee bukanlah hal yang mudah, Audit fee ditentukan berdasarkan ruang lingkup dan risiko yang ditanggung oleh auditor dalam penugasan audit. Walaupun sudah ditetapkan sebelumnya, mungkin saja bisa muncul permasalahan seperti salah satu kasus tentang audit fee yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Masalah muncul ketika laporan keuangan tersebut diaudit oleh Akuntan Publik Kasner Sirumapea dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan Rekan. Sebelumnya, laporan keuangan PT Garuda Indonesia menuai polemik. Hal tersebut dipicu oleh penolakan dua komisaris Garuda Indonesia, Chairal Tanjung dan Dony Oskaria untuk mendatangi persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Keduanya memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata senilai US\$239,94 juta pada pos pendapatan. Pasalnya, belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir 2018. Kelalaian yang terjadi yaitu Akuntan Publik bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab, Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara nominal belum diterima oleh perusahaan. Sehingga Akuntan Publik ini terbukti melanggar Standar Audit 351.

Sebelumnya, Kemenkeu menjatuhkan dua sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero)

Tbk untuk tahun buku 2018. Tak hanya itu, KAP yang mengaudit laporan keuangan Garuda Indonesia juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan reuiu oleh BDO International Limited kepada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan.

Adapun contoh dari kasus lain terkait *fee audit* terjadi pada perusahaan Toshiba. Kasus Toshiba menimbulkan pertanyaan bagi akuntan terkait rendahnya biaya audit yang diberikan perusahaan Jepang untuk membayar auditor mereka. Jika biaya audit rendah, berarti mereka tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya yang terkait dengan audit perusahaan Toshiba, terutama jika terjadi penyimpangan akuntansi dengan keterlibatan manajemen sehingga tingkat deteksi lebih sulit. Kasus Toshiba bermula atas inisiatif perdana menteri Abe yang ingin transparansi perusahaan-perusahaan Jepang lebih menarik dalam mendapatkan investor asing. Toshiba dalam menyanggupi hal ini menyewa panel independen yaitu akuntan dan pengacara untuk menyelidiki perusahaannya, ternyata dalam laporan yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥151,8 miliar sejak tahun 2008. Hal ini terjadi dikarenakan target yang besar sebelum akhir tahun sehingga menyebabkan kepala unit bisnis untuk merekayasa laporan keuangannya dengan penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus menerus. Akibatnya CEO Toshiba, Hisao Tanaka mengundurkan diri lalu keesokan harinya disusul oleh Norio Sasaki wakil CEO Toshiba. Panel independen tersebut mengatakan bahwa kedua CEO tersebut tidak mungkin tidak tahu atas praktik merekayasa laporan keuangan ini dan hal tersebut pasti dilakukan dengan sengaja (<https://akuntansiterapan.com/2015>).

Besarnya *fee* yang diberikan tergantung bagaimana penugasan audit yang dilaksanakan serta bagaimana tingkat keahlian seorang akuntan publik dalam melaksanakan tugasnya tersebut. *Fee audit* juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara lain, ukuran perusahaan, ukuran KAP dan kompleksitas audit.

Ukuran sebuah perusahaan biasanya ditentukan oleh total aset, pendapatan, omset atau jumlah karyawan. Perusahaan yang lebih besar biasanya membutuhkan jasa audit dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Banyak penelitian yang telah meneliti hubungan antara ukuran perusahaan dengan *audit fee*. Diantaranya terdapat pada penelitian Sanisah Huri dan Efrizal Syofyan (2019) yang mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan pada penetapan *audit fee*. Pada penelitian yang dilakukan Safira Dwi Nasiti dan Yuliasuti Rahayu (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada penetapan *audit fee*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ira Afri Setiani (2020) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penetapan *audit fee*.

Ukuran kantor akuntan publik dibedakan menjadi 2 yaitu kantor *The Big Four* dan *Non Big Four*. *The Big Four* dianggap sebagai firma audit terbesar di dunia dengan kualitas audit yang baik, dan diyakini mampu memberikan kualitas audit yang lebih tinggi lagi karena kekuatan finansial dan pengetahuan mereka. Pada penelitian yang dilakukan Sanisah Huri dan Efrizal Syofyan (2019) ukuran KAP berpengaruh signifikan pada penetapan *audit fee*. Pada penelitian yang dilakukan David Bernandus Pandia dan Nurul Fachriyah (2021), ukuran KAP juga berpengaruh positif pada penetapan *audit fee*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Ira Afri Setiani (2020) bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh pada penetapan *audit fee*.

Kompleksitas audit, yaitu seberapa menantang suatu tugas audit yang dirasakan oleh auditor, dapat berdampak pada fee audit karena auditor akan melakukan lebih banyak aktivitas audit yang lebih kompleks dan banyak. Beberapa hal dalam menentukan kompleksitas audit, diantaranya menyangkut jumlah anak perusahaan, transaksi dalam mata uang asing, dan operasi luar negeri. Pada penelitian yang dilakukan Nova Yulianti, Henri Agustin dan Salma Taqwa (2019), kompleksitas audit berpengaruh positif pada penetapan *audit fee*. Penelitian yang dilakukan oleh Sheha Silvia dan Dedik Nur (2019) menguatkan bahwa kompleksitas audit berpengaruh positif pada penetapan *audit fee*. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan David Bernandus Pandia dan

Nurul Fachriyah (2021), bahwa kompleksitas audit tidak berpengaruh pada penetapan *audit fee*.

Besarnya biaya audit tentunya menjadi objek yang menarik untuk diperhatikan. Unsur-unsur yang mempengaruhi besarnya biaya audit semakin menarik untuk diteliti semakin tinggi biaya audit yang dibebankan KAP kepada perusahaan. Akan lebih mudah bagi auditor dan perusahaan yang menggunakan jasa audit untuk menentukan besarnya biaya audit jika mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi biaya tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang disusun oleh Raymond Immanuel dan Etna Nur Yuri Yuyetta (2014). Dalam penelitian tersebut ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik memiliki pengaruh signifikan pada *audit fee*. Sedangkan pada penelitian Ira Afri Setiani (2020) ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Selain itu, penelitian ini juga didasari oleh penelitian Mudrika Alamsyah Hasan (2017) kompleksitas audit, profitabilitas klien, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap *audit fee*. Sedangkan pada penelitian yang dibuat oleh Napitupulu, Yessy Claudya Yosephine (2018) menyatakan bahwa kompleksitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan pada *audit fee*.

Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan manufaktur merupakan perusahaan dengan skala besar jika dibandingkan dengan perusahaan lain sehingga bisa dilakukan perbandingan antara perusahaan satu dengan perusahaan lain. Berdasarkan fenomena yang sudah penulis uraikan diatas serta ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP dan kompleksitas audit terhadap *audit fee*. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ulang dengan judul **“Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP dan Kompleksitas Audit Terhadap Audit Fee (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2017-2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat disimpulkan rumusan masalah berikut diantaranya :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit fee*?
2. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *audit fee*?
3. Apakah kompleksitas audit berpengaruh terhadap *audit fee*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diantaranya :

1. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit fee*.
2. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh ukuran KAP terhadap *audit fee*.
3. Menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pengaruh kompleksitas audit terhadap *audit fee*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat kepada penulis sendiri dan pembaca. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Penulis, secara teoritis penulis akan memperoleh pemahaman dan menambah wawasan yang lebih dalam mengenai hal penelitian pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP dan kompleksitas audit terhadap *audit fee*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu mmenambah wawasan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman bagi auditor tentang hubungan pengaruh ukuran perusahaan, ukuran KAP dan kompleksitas audit terhadap *audit fee*.

b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat agar dapat memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *audit fee*.

c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain dan dapat meneliti perusahaan lain selain sektor manufaktur.

